

Persembahan Atas Pengukuhan
Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. sebagai Guru Besar
Ilmu Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah
IAIN Sumatera Utara

ILMU PENDIDIKAN & Masyarakat Belajar

STRATEGI PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA ERA GLOBAL

Editor: Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.



ILMU PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT PEMBELAJAR

Strategi Pendidikan untuk Pengembangan
Sumberdaya Manusia Era Global

Editor:

Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

citapustaka
MEDIA PERINTIS

ILMU PENDIDIKAN & MASYARAKAT BELAJAR

**Strategi Pendidikan untuk Pengembangan
Sumberdaya Manusia Era Global**

Editor: Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.

Copyright © 2010, Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Imada Syaifullah Daulay
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

Citapustaka Media Perintis

Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung Telp. (022) 82523903

Contact person: 08126516306-08562102089

E-mail: citapustaka@gmail.com

Website: citapustaka.com

Cetakan pertama: Nopember 2010

ISBN 978-602-8826-29-7

Didistribusikan oleh:

Perdana Mulya Sarana

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756

E-mail: asrulmedan@gmail.com

Contact person: 08126516306

DAFTAR ISI

Pengantar Editor	v
Sambutan Dekan	viii
Sambutan Rektor	xi
Daftar Isi	xiv
Kontributor	xvi

BAGIAN I

SEKILAS TENTANG PEMIKIRAN PENDIDIKAN

PROF. DR.SYAFARUDDIN, M.PD.	1
--	---

BAGIAN II

PENDIDIKAN ISLAM KONTEMPORER 37 |

A. Pendidikan Islam Dalam Era Digital	
Dr. Mardianto, M.Pd.	39
B. Menimbang Visi Baru Pendidikan Islam	
Drs. Amiruddin. MS. MA.	53
C. Esensi Metode dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam	
HJ. Ira Suryani, M.Si.	67
D. Finansial Pendidikan Islam (Menoleh Pembiayaan	
Lembaga Pendidikan Islam Klasik)	
Sapri, MA.	87

BAGIAN III

STRATEGI MANAJEMEN DAN PENINGKATAN MUTU

SEKOLAH	103
----------------------	-----

A. Eksistensi Madrasah Swasta Pasca Undang-Undang	
Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	
Dr. Muhammad Syaifudin, M.Ag.	105
B. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis Kompetensi	
di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan	

Dr. Siti Halimah, M.Pd.	121
C. Supervisi Pendidikan	
Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag.	138
D. Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia	
Prof. Dr. H. Fachruddin, M.A.	150
E. Integrasi Perencanaan Strategik dengan Peningkatan Mutu	
Candra Wijaya, M.Pd.	161

BAGIAN IV

ANTARA MENDIDIK DAN MENGAJAR 179

A. Pembelajaran Yang Mendidik	
Drs. Amiruddin Siahaan, M.Pd.	181
B. Meningkatkan Kualitas pembelajaran Pendidikan Terdesentralisasi	
Dr. Indra Jaya, M.Pd.	211
C. Performance Assesment (Penilaian Unjuk Kerja)	
Rusydi Ananda, M.Pd.	231

BAGIAN V

EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA 251

A. Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Unggul Melalui Pendidikan	
Drs. Syahrums, M.Pd.	253
B. Peran Ibu dalam Pengembangan Potensi Keagamaan Anak	
Dr. Masganti Sit, M.Ag.	267
C. Pemberdayaan Konseling dalam Kehidupan Manusia	
Drs. Abdurrahman, M.Pd.	281
D. Laskar Pelangi The Phenomenon: Merajut Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yangh Tercecer	
Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag.	289
E. Bahasa Sebagai Identitas Pendidikan dalam Era Globalisasi	
Tien Rafida, M.Hum.	296

MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN TERDESENTRALISASI

Dr. Indra Jaya, M.Pd.

A. Pendahuluan

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem desentralisasi, dan salah satu aspek yang didesentralisasikan adalah bidang pendidikan. Pertanyaan mendasar yang semestinya harus kita pikirkan adalah: “Apakah dengan melaksanakan desentralisasi dalam bidang pendidikan akan mampu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan di daerah?” dan “Apakah sistem sentralisasi dalam bidang pendidikan selama ini tidak mampu untuk menciptakan *output* dan *outcome* pendidikan yang berkualitas?”

Berkenaan dengan kedua pertanyaan di atas “Apakah sudah ada *re-search* yang telah dilakukan sehingga mampu untuk menjawab kedua pertanyaan mendasar tersebut?”. Inilah persoalan yang seringkali terjadi dalam kehidupan berbangsa kita. Seringkali bangsa ini memutuskan dan menetapkan suatu ketetapan, namun belum diketahui akibat dari ketetapan tersebut – dampak positif dan dampak negatifnya.

Untuk menyahuti persoalan-persoalan yang timbul akibat pelaksanaan desentralisasi dalam bidang pendidikan, maka dalam tulisan ini akan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dan usaha yang semestinya dilakukan oleh elemen-elemen di daerah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut.

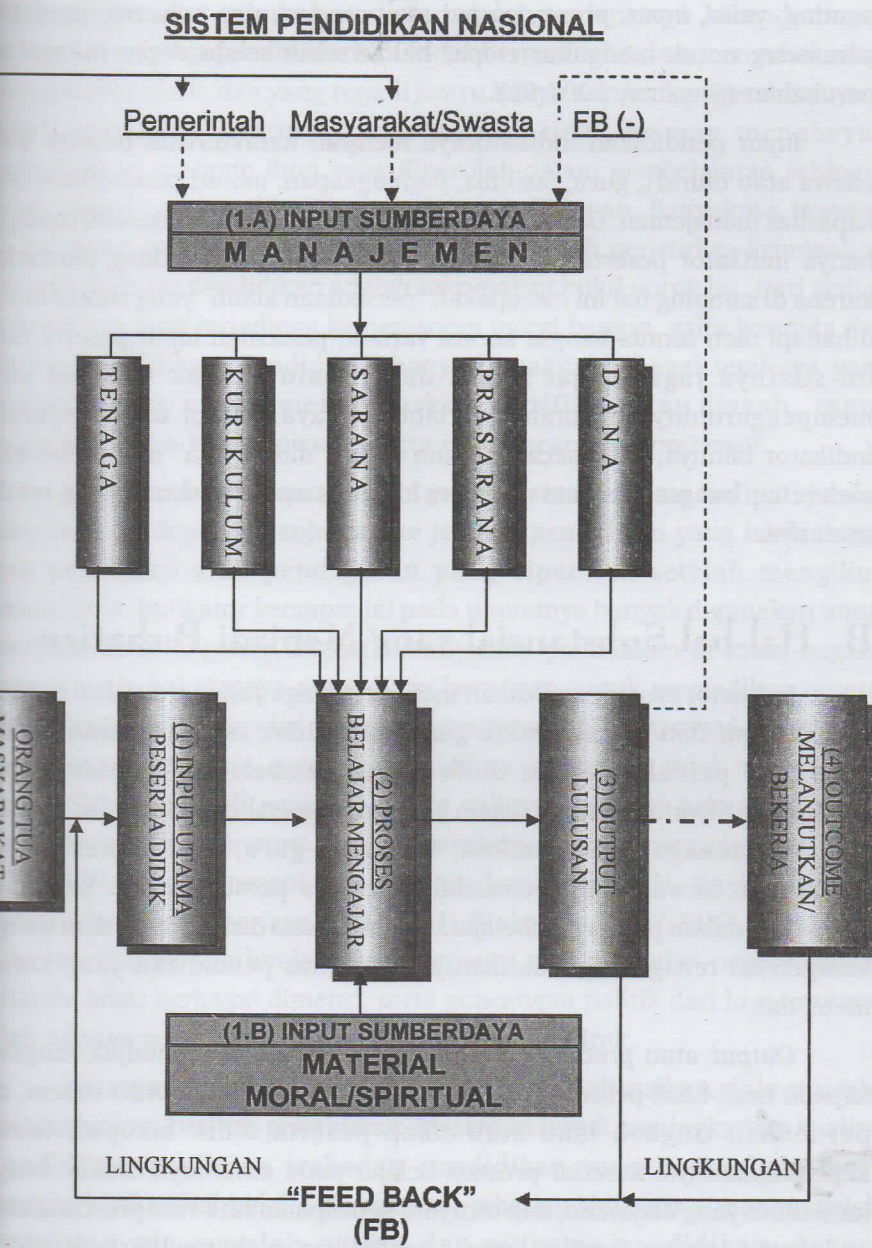
Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dapat dicermati dari paradigma pendidikan sebagai sebuah sistem dan urgensi pendidikan dalam konteks desentralisasi. Sedangkan usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dilakukan melalui pendekatan

system "pendidikan membebaskan pendidikan".

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik (manusia) agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, estetik, dan demokratis, serta memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan. Singkatnya bahwa pendidikan itu adalah suatu usaha berdasarkan kesadaran dan terencana yang dilakukan untuk memanusiakan manusia.

Dengan tujuan tersebut maka dapat digambarkan pula fungsi pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Persolan di atas tidaklah semudah seperti apa yang dibayangkan karena pendidikan merupakan persoalan yang sangat kompleks, banyak aspek yang terkait di dalamnya. Secara makro pendidikan memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya atau budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat yang kuat dan dinamis akan menghasilkan pendidikan yang maju dan berkualitas tinggi, sebaliknya budaya masyarakat yang lemah dan statis akan menghasilkan pendidikan yang rendah kualitasnya. Tetapi bagaimanapun juga, ketika sebuah bangsa mulai dihadapkan oleh kondisi yang sangat kritis, maka merupakan sebuah kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk segera memperbaiki kondisi kritis tersebut. Untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pendidikan biasanya dengan melihat pendidikan sebagai sebuah sistem (Pongtuluran, 1989). Sebagai gambaran, berikut ini sistem pendidikan Nasional Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Sistem Pendidikan Nasional

Dari gambar di atas maka dapat dirinci menjadi 4 (empat) indikator penting, yaitu, *input*, *proses*, *output* atau *product*, dan *outcome*, meskipun parameter untuk mengukur empat hal tersebut selalu dapat mengalami perubahan (Suyanto, 2002:99).

Input pendidikan indikatornya meliputi karakteristik peserta didik (siswa atau murid), guru, fasilitas, perlengkapan, materi pendidikan, serta kapasitas manajemen. Dari sejumlah indikator input pendidikan ini mungkin hanya indikator peserta didik yang relatif tidak mengundang persoalan karena di samping hal ini merupakan "persediaan alami" yang secara umum dihadapi oleh semua bangsa secara variatif, persoalan *input* peserta didik ini sifatnya juga sangat relatif dan terlalu banyak variabel yang mempengaruhinya, terutama variabel budaya. Tetapi untuk sejumlah indikator lainnya, yang secara umum dapat "direkayasa" dan diusahakan oleh setiap bangsa, ternyata di negara kita juga masih termasuk yang rendah mutunya.

B. Hal-hal Substansial yang Menjadi Perhatian

Indikator *Proses* pendidikan meliputi tenaga yang terdiri dari perilaku administratif dan alokasi waktu guru, kurikulum, sarana, prasarana, dan dana, dan perilaku peserta didik proses pembelajaran. Dalam proses pendidikan diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan kondisi kondusif terhadap tenaga kependidikan, terutama guru, agar mereka dapat melakukan inovasi dan kreasi dalam proses pembelajaran. Lemahnya kreativitas dalam proses pembelajaran di Indonesia disamping terkait dengan kompetensi tenaga kependidikan juga fasilitas pendidikan yang kurang memadai.

Output atau *product* pendidikan indikatornya menunjuk langsung kepada hasil-hasil peserta didik, prestasi belajar, produktivitas sistem, dan perubahan tingkah laku atau sikap peserta didik maupun tenaga kependidikannya. Standar prestasi belajar pada umumnya diukur dengan kurikulum yang diajarkan, dan ternyata pencapaian rata-rata prestasi belajar pada setiap lulusan di setiap jenjang pendidikan selalu rendah. Peserta didik yang mencapai nilai dengan kriteria baik ke atas pada umumnya tidak mencapai 25 % dan selebihnya bernilai cukup atau sedang, sehingga apa yang disebut dengan "belajar tuntas" hanyalah sebagai impian belaka (Tilaar, 2001:129-133).

Tetapi yang lebih menarik perhatian dalam kaitannya dengan *output* yang menyangkut perubahan sikap, adalah terdapatnya kecenderungan bahwa hampir saja pendidikan kita "tidak bermakna" dalam mengubah sikap para peserta didik, dan yang terjadi justru hanya tranfer "pengetahuan yang tidak bermakna", artinya peserta didik tidak mampu menghayati pengetahuan maupun ilmu yang diperoleh dalam pembelajaran sehingga tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan. Banyaknya tawuran di kalangan pelajar dan mahasiswa dan sejumlah peristiwa kriminalitas lainnya di dunia pendidikan adalah merupakan bukti untuk itu. Dari sinilah sebenarnya awal terjadinya kemerosotan moral bangsa, yaitu bermula dari sistem pendidikan. Pendidikan hanya dimaknai sebagai lembaga yang berkompeten untuk mengeluarkan sertifikat atau ijazah, tanpa memperhatikan kemampuan peserta didik secara komprehensif.

Indikator kualitas pendidikan yang disebut *outcome* meliputi jumlah lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan pekerjaan atau pendapatan yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan. Indikator keempat ini pada umumnya banyak digunakan untuk menjustifikasi langsung tingkat keberhasilan pendidikan di suatu negara, karena pada hakekatnya pendidikan bertujuan untuk menjadikan peserta didik dapat hidup mandiri tidak menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Dengan kata lain, *outcome* pendidikan seharusnya tidak menganggur, atau bahkan menjadi penjahat akibat sulitnya mencari pekerjaan karena tidak memiliki kemampuan. Sebagai gambaran, tingkat pengangguran tahun 1993/1994 saja mencapai rata-rata; tingkat SMU 7,3 %, tingkat Diploma 9,49 % dan tingkat sarjana S1 12,14 % (Rahardjo, 1997:248), maka dapat dibayangkan berapa jumlah pengangguran saat ini ketika negara sedang dilanda krisis berbagai dimensi, serta goncangan politik dari luar terutama oleh adanya serangan Amerika Serikat terhadap Irak.

Keempat elemen itulah yang perlu direalisasikan dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan. Meskipun untuk meningkatkan kualitas pendidikan penilaian terhadap pendidikan yang berkualitas mesti memperhatikan hal-hal di atas, namun perhatian kita pada umumnya selalu terfokus pada masalah *output* dan *outcome* pendidikan, dengan mengabaikan dua hal lainnya yakni *input* dan *proses*. Kecenderungan semacam ini merupakan penilaian yang terjadi dalam masyarakat secara umum, yang mungkin dipengaruhi oleh sikap dan perilaku kehidupan yang semakin pragmatis. Tetapi di kalangan masyarakat terdidik seharusnya

melakukan penilaian pendidikan secara komprehensif, bahkan lebih dari empat indikator tersebut.

Apa yang diharapkan dari pendidikan berkualitas memang harus disesuaikan dengan tuntutan global yang sedang dihadapi oleh manusia. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, pendidikan harus memiliki prioritas agar peserta didik dapat memiliki kemampuan dan kekuatan yang relevan tuntutan globalisasi itu. Sehubungan dengan itu, tidaklah salah bila peningkatan kualitas pendidikan harus diarahkan kepada tiga kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu;

1. Penguasaan Bahasa Asing

Bahasa Asing, terutama bahasa Inggris, merupakan bahasa komunikasi dan ilmu pengetahuan yang paling populer. Hampir semua ilmu pengetahuan dan teknologi ditulis dalam bahasa tersebut. Oleh sebab itu bangsa yang ingin maju harus menguasai bahasa tersebut secara baik. Penguasaan bahasa asing harus ditekankan semenjak pendidikan dasar, dan ketika selesai pendidikan menengah atas diharapkan peserta didik telah mampu berbahasa secara baik. Kondisi penguasaan bahasa Asing di negara kita saat ini memang sangat ketinggalan. Kemampuan berbahasa Inggris SDM Indonesia yang paling jelek jika dibandingkan dengan Singapura, Philipina, Malaysia dan Thailand, bahkan juga masih kalah bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Selatan seperti India dan Pakistan (Rahardjo, 1997:222).

2. Penguasaan Iptek

Dominasi iptek dalam kehidupan global tidak dapat dibendung lagi. Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki kemampuan Iptek. Bahasa yang dikuasai pada dasarnya hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dengan bangsa lain dan untuk menguasai Iptek lebih baik. Dalam hal ini kita dapat melihat bangsa Jepang misalnya, meskipun dengan sumber daya alam yang sangat terbatas namun dengan penguasaan Iptek yang baik, maka dapat menguasai perekonomian dunia. Tetapi kelihatan bahwa negara kita justru kurang responsif dalam mempersiapkan generasi dengan kemampuan Iptek yang tinggi ini, terbukti dengan seringnya penanganan puncak urusan Iptek diserahkan pada personel yang tidak menguasai sama sekali dengan masalah Iptek. Sementara orang-orang yang memiliki kemampuan Iptek memadai justru tidak diperhatikan bahkan dipinggirkan.

Begitu pentingnya masalah penguasaan Iptek dalam menghadapi

perkembangan Ilmu dan Teknologi yang semakin maju ini, maka UNESCO, sebuah lembaga dunia di PBB, mengembangkan program "Melek Ilmu dan Teknologi untuk Semua", dengan proyek besar yang diberi nama "Project 2000 + ; *An International Project on Scientific and Technological Literacy for All*", yang dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda abad 21 (Rahardjo, 1997:51).

3. Apresiasi dan Penguatan Budaya

Realitas kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari budayanya. Budaya merupakan identitas manusia yang paling hakiki. Nilai budaya umat manusia ada yang berasal dari tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dan ada pula yang berasal dari nilai-nilai agama. Keduanya dapat menyatu, dan nilai-nilai tersebut selalu dipertahankan. Oleh sebab itu masalah budaya bagaimana-pun keadaannya, tidak dapat diabaikan. Kemajuan Iptek tidak akan bermakna tanpa identitas budaya yang dipegang erat. Manusia dapat menghayati makna kehidupan dengan budayanya, termasuk dalam hal ini keyakinan (agama). Bangsa barat maju dengan nilai budayanya. Di Timur bangsa Jepang, dan Korea Selatan (yang mulai tumbuh), juga maju dengan budayanya (Anh, 1985).

Budaya bangsa secara natural memang ada yang bernilai apresiatif terhadap perkembangan dan kemajuan, tetapi ada juga yang tidak. Nilai budaya yang didasarkan pada agama-agama *sawawy* atau agama wahyu (*revealed religion*) umumnya bersifat apresiatif terhadap perkembangan dan kemajuan umat manusia. Tetapi sebaliknya budaya yang didasari dengan nilai-nilai agama *ardhy* atau budaya (*cultural religion*) sering bertentangan dengan fithrah kemajuan manusia, dalam hal ini budaya mistik misalnya. Apresiasi terhadap budaya ini memang perlu, karena kecenderungan yang berkembang di kalangan bangsa Indonesia justru budaya dimaknai dengan makna yang amat sempit. Budaya hanya diberi makna "seni", dan bahkan yang lebih fatal lagi "seni"-pun juga dipahami sangat pragmatis, yaitu sebatas hal-hal yang dapat menghibur dan menggembirakan (*fun*), yang bersifat sensual semata, sehingga citra budayanya hilang dan bahkan cenderung melanggar etika moral maupun agama. Hal seperti ini justru akan melemahkan bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu apresiasi budaya dan penguatan budaya harus menjadi prioritas dalam mewujudkan kualitas pendidikan, untuk menyembadani agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas diri. Apa yang kita inginkan dari strategi penguatan budaya ini